

Dinamika Inklusi Sosial Masyarakat Islam: Posisi Kaum *Mawali* dalam Pembangunan Umat Islam di Jazirah Arab

The Dynamics of Social Inclusion in Islamic Society: The Position of Mawali in the Development of the Muslim Community in the Arabian Peninsula

Muhamad Yusrul Hana^{*1}, Muhammad Nur Ichsan Azis²

¹Sejarah dan Kebudayaan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung, Jl. Kayen Sukolilo KM 01, Kayen, Pati, Jawa Tengah.

²Badan Riset dan Inovasi Nasional, Khazanah Peradaban dan Keagamaan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Co-Working Space Sulawesi Selatan.

*Corresponding Author: myusrulhana@staisyekhjangkung.ac.id

Submit: 11 Mei 2023

Revised: 15 Mei 2023

Accepted: 19 Mei 2023

Published: 20 Mei 2023

Abstract

Social inclusion is a formal concept that exists in Islam. This concept is seen in several historical periods set in the development of classical Islamic civilization. From the time of the Prophet SAW until the time of Khulafa Al-Rasydun, the mawali people got a fair place. They were marginalized during the Umayyad era, due to the hegemony of Arabism. The mawali began to fully contribute to Islamic civilization during the Abbasid era to collaborate in building the ummah together. Because the main goal of social inclusion is prosperity for all people, this concept must be guided by religious values so that it leads to goodness. This study wants to explain the application of social inclusion of Muslims in the Arabian Peninsula as a process of uniting Arab Muslims and non-Arab Muslims in Islamic civilization. The method used in this study is historical research methods including heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that social inclusion based on Islamic values, namely ukhuwah Islamiyah, tasamuh, and ishlah can unite Muslims in building shared prosperity in the Arabian Peninsula.

Keywords: social inclusion, community dynamics, mawali, community development

Abstrak

Inklusi sosial menjadi satu konsep formal yang ada dalam Islam. Konsep inilah yang terlihat dalam beberapa periode sejarah berlatar pembangunan peradaban Islam masa klasik. Paada masa Nabi SAW sampai masa Khulafa Al-Rasydun kaum mawali mendapat tempat yang adil. Mereka terpinggirkan pada masa Umayyah, akibat hegemoni Arabisme. Kaum mawali mulai berkontribusi penuh dalam peradaban Islam pada masa Abbasiyah untuk berkolaborasi membangun umat secara bersama. Karena tujuan utama dari inklusi sosial adalah kemakmuran bagi semua orang, maka konsep ini harus berpedoman pada nilai-nilai agama agar menjurus kepada kebaikan. Penelitian ini ingin menjelaskan penerapan inklusi sosial umat Islam di Jazirah Arab sebagai satu proses persatuan Muslim Arab dan Muslim non-Arab dalam peradaban Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan, inklusi sosial berlandaskan nilai-nilai Islam yaitu ukhuwah islamiyah, tasamuh, dan ishlah dapat mempersatukan umat Islam dalam membangun kemakmuran bersama di Jazirah Arab.

Kata Kunci: inklusi sosial, dinamika masyarakat, kaum mawali, pembangunan umat

PENDAHULUAN

Ketika melihat susunan masyarakat Islam di Jazirah Arab, kita akan menemui status sosial masyarakat yang disebut mawali. Mereka adalah orang-orang non-Arab yang telah memeluk Islam. Istilah mawali jamak dari mawla yang memiliki beberapa arti yaitu budak yang telah dimerdekakan, tuan yang memerdekakan sahabat karib, kerabat, dan orang yang memberikan perlindungan. Artian istilah tersebut dipakai pada masa pra-Islam. Meskipun demikian, istilah itu juga mulai digunakan untuk menyebutkan orang asing non-Arab yang merdeka.

Gelombang penduduk kaum mawali muncul, disebabkan karena penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam ke berbagai wilayah. Meskipun mereka bagian dari umat Islam, tetapi mereka sering diperlakukan tidak adil. Mereka sering dibedakan dengan orang-orang Arab. Saat itu timbullah dikotomi antara bangsa Muslim Arab dan Muslim non-Arab (mawali). Saat itu sering juga ditemukan orang Muslim Arab banyak melakukan penindasan dan berselisih paham dengan golongan mawali.

Masuknya golongan mawali ternyata menimbulkan reaksi penting bagi bangsa Muslim Arab. Mereka berusaha menyerap kalangan mawali ke dalam struktur klan lama mereka, untuk mengikuti budaya Arab pra-Islam. Dimana status kaum mawali dianggap sebagai klien atau sekutu. Sehingga keturunan mawali juga berstatus sebagai klien. Karena status tersebut kaum mawali menerima berbagai keistimewaan, seperti bantuan pengaturan perkawinan, perlindungan keamanan, dan masih banyak lagi. Namun, hal tersebut mempunyai konsekuensi yang harus diterima kaum mawali, yaitu loyalitas terhadap bangsa Muslim Arab dan penurunan status kaum mawali menjadi nomor dua (Lapidus, 1999).

Kedudukan mawali secara struktur berada di bawah bangsa Muslim Arab. Karena kedudukannya nomor dua, kaum mawali selalu berusaha mendapatkan haknya agar sama kedudukannya dengan bangsa Muslim Arab. Hal ini menjadikan nilai-nilai Islam tidak terlaksana dengan penuh pada masa itu. Karena Islam memandang semua Muslim berkedudukan sama di mata Allah SWT, kecuali dibedakan mengenai ketakwaannya. Meskipun dalam status sosial di posisi kedua, nantinya kehadiran kaum mawali dalam sistem sosial umat Islam telah menimbulkan dampak positif dalam pembangunan peradaban di berbagai bidang pada masa berikutnya (Ikhsan, 2015).

Sampai pada masa penaklukan wilayah di luar Makkah dan Madinah, yaitu dari masa Khalifah Umar bin al-Khattab sampai masa Dinasti Umayyah, kaum mawali ini tetap terdiskriminasi oleh beberapa penguasa Muslim Arab.

Sekalipun sikap fanatisme bangsa Arab menjadi ciri utama Dinasti Umayyah, namun fanatisme tersebut tidak mengurangi kiprah dan peran kaum mawali di dunia Islam. Dalam segi keilmuan bangsa Arab umumnya lebih banyak tertarik pada kemiliteran, kesustraan dan sejarah. Akan tetapi kaum mawali lebih berkiprah di bidang pengetahuan lain seperti matematika, ilmu pasti, manajemen, pemerintahan, dan lain-lain. Karena itu di era Khalifah Muawiyah banyak juga kaum mawali yang memegang posisi di pemerintahan.

Khalifah Muawiyah sebenarnya merasa khawatir akan keadaan tersebut dan memanggil Ahnaf bin Qais dan Samrah ibn Jundab untuk meminta nasihat. Akhirnya Muawiyah memilih saran Ahnaf, yaitu menempatkan kaum mawali sebagai mitra dalam mengurus kepentingan negara. Kebijakan ini memang terlihat diskriminatif, melihat kaum mawali diposisikan sebagai golongan masyarakat kelas kedua dalam sistem sosial bangsa Arab.

Menurut M.A.J. Beg terdapat peran kaum mawali di era Bani Umayyah yaitu diangkatnya mereka dalam beberapa jabatan, baik di Damaskus atau di wilayah lainnya seperti di Departemen Keuangan (Diwan al-Kharaj), Departemen Surat Menyurat (Diwan al-Rasail), jabatan direktur dan masih banyak lagi, bahkan tidak sedikit mawali yang dijadikan gubernur, seperti Abdul Muhajir Dinar, (Amir Mesir), Ismail Abdullah bin Abil Muhajir (Amir Maghrib), Ubaidillah bin Al-Habbab, Thariq bin Amir (Amir Madinah). Kedudukan tersebut dilatarbelakangi keahlian yang mereka miliki, loyalitas mereka pada Bangsa Arab, contohnya dalam bahasa, dan komitmen keislaman (Saragih, 2000).

Angin segar kesetaraan mulai didapatkan kaum mawali ketika Dinasti Abbasiyah memimpin. Kaum mawali berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa

itu. Bahkan keluarga Barmak (Khalid Barmak) dipercaya untuk mengurus administrasi negara dan diberikan jabatan-jabatan penting. Pada masa Abbasiyah gengsi kekerabatan sudah tidak nampak dengan adanya asimilasi, dimana kaum mawali membawa dinasti ini kehilangan jati diri sebagai bangsa Arab menuju bangsa yang majemuk.

Untuk memperlancar proses pembaharuan antara bangsa Muslim Arab dengan rakyat taklukan, lembaga poligami, selir, dan perdagangan budak terbukti efektif saat unsur Arab murni surut. Orang mawali dengan anak perempuan yang dimerdekakan mulai menggantikan posisi mereka. Sistem aristokrasi Arab mulai tergantikan oleh hierarki pejabat yang mewakili berbagai bangsa, yang semula didominasi oleh Persia kemudian Turki (Karim, 2014).

Penelitian ini penting dilakukan guna mengelaborasi lebih mendalam persoalan inklusi sosial, persaudaraan umat Islam, dan peranan kaum mawali dalam peradaban Islam. Sebagai bagian dalam masyarakat Islam, kaum mawali sering diistilahkan sebagai seorang non-Arab yang rendah. Status sosial mereka menempati posisi terendah pada masa Dinasti Umayyah yang sangat mengagungkan keturunan Arab. Selain itu, perbedaan status sosial ini disebabkan karena bangsa Arab ingin tetap eksis berkuasa demi kelangsungan hidup mereka dan keturunannya dengan menafikan bangsa non-Arab (Ikhsan, 2015). Sikap superior bangsa Arab yang telah mengungguli kekuatan Persia dan Romawi sejak masa Nabi SAW, membuat mereka merasa bangsa Arab adalah bangsa yang unggul. Mereka juga dipersatukan dengan ashabiyah yang semakin menunjang kegemilangan kemenangan Islam atas musuh-musuhnya sejak masa Nabi SAW sampai era Khulafa Al-Rasyidun (Yusrul, 2020).

Tetapi, konsep mawali yang rendah mulai memudar ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah Umayyah. Kebijakan menghapuskan jizyah (pajak) bagi kaum mawali dan dipercayanya mereka untuk menempati posisi penting pemerintahan, menjadi sebuah perubahan sosial positif bagi pelaksanaan ajaran inklusif dalam Islam. Meskipun Islam lahir dan berkembang di Jazirah Arab, tetapi peran golongan non-Arab sangat dignifikan dalam peradaban Islam. Mereka mampu membawa Islam mengalami era kemajuan pada masa Dinasti Abbasiyah. Sampai nantinya kaum mawali menjadi bagian utama dalam perkembangan pemikiran Islam masa Dinasti Abbasiyah.

Kajian tentang mawali dan inklusi sosial tentunya telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti karya Muh. Ikhsan yang menitikberatkan pada strata sosial kaum mawali di Jazirah Arab dan kontribusi kaum mawali Persia masa klasik dalam kemajuan Islam pada masa klasik Islam (Ikhsan, 2015). Karya Dudung Abdurrahman yang menitikberatkan pada pembentukan multikulturalisme umat Islam akibat dari arabisme Umayyah. Multikulturalisme juga terjadi karena dorongan akulturasi antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab (mawali) akibat perluasan wilayah Islam dan fenomena pluralisme Islam terlihat dalam masa kemajuan pembangunan Dinasti Abbasiyah (Abdurrahman, 2016). Sitti Faoziah yang menitikberatkan pada peranan ukhuwah islamiyah, musawah, dan ihsan dapat menjadi landasan untuk mendorong inklusi sosial yang lebih luas dalam masyarakat (Faoziah, 2023). Dan karya Zain Abidin yang menitikberatkan pentingnya umat Islam kembali pada konsep inklusi Islam sebagai satu doktrin Islam yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Abidin, 2013)

Penelitian-penelitian sebelumnya secara eksplisit menitikberatkan pada kontribusi Muslim non-Arab atau kaum mawali di bidang ilmu pengetahuan masa Dinasti Abbasiyah. Serta penerapan doktrin nilai-nilai keislaman dalam menunjang praktik inklusi Islam. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya belum menjelaskan kedudukan kaum mawali dalam proses sejarah Islam mulai dari masa Nabi SAW sampai masa Dinasti Abbasiyah. Bahwa datangnya kaum mawali sejatinya telah membawa umat Islam bertransformasi untuk menerapkan sikap persaudaraan, egaliter dan inklusi dalam setiap perjalanan sejarah. Kaum mawali tidak hanya datang membawa pembaruan ilmu pengetahuan, mereka juga membawa umat Islam untuk belajar bersama dan bertransformasi dalam bidang sosial demi kemantapan penerapan nilai-nilai Islam yaitu dalam konsep inklusi sosial. Maka, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya.

Untuk memahami secara mendalam tentang permasalahan di atas, penelitian ini memusatkan pada beberapa pertanyaan yaitu bagaimana kedudukan kaum mawali dalam proses sejarah Islam?, Bagaimana peran kaum mawali dalam kemajuan peradaban Islam?.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan 1) menggambarkan kedudukan kaum mawali dalam proses sejarah Islam guna mengetahui status dan kedudukannya dalam masyarakat Islam, 2) menjelaskan keberadaan kaum mawali telah mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan mendorong pembelajaran bersama akan terciptanya sikap inklusi sosial masyarakat di Jazirah Arab.

METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan empat metode penelitian sejarah (Abdurrahman, 2011). Metode sejarah yang digunakan dimaksudkan untuk menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Empat langkah metode yang dimaksud di atas dilakukan dalam proses penelitian sebagai berikut. Pertama heuristik merupakan teknik pengumpulan data dari beberapa e-jurnal dan buku-buku yang mengkaji tentang mawali dan inklusi sosial. Kedua, kritik eksternal dan internal dilakukan untuk menguji kredibilitas dan kesahihan sumber. Kritik eksternal adalah kritik untuk menguji keaslian atau otentisitas sumber yang berkaitan dengan bahan yang digunakan sumber tersebut (Hamid & Madjid, 2015). Kritik internal adalah kritik yang dilakukan untuk menyeleksi, menguji, dan membandingkan informasi yang terkandung dalam sumber sejarah berkaitan dengan kredibilitasnya (Hamid & Madjid, 2015). Ketiga, interpretasi sebagai tahap penafsiran data yang telah menjadi fakta dengan menganalisis dan mensintesis fakta-fakta yang relevan (Kuntowijoyo, 2001). Interpretasi dikembangkan bersamaan dengan analisis yang didukung oleh teori-teori yang digunakan dalam penelitian (Abdurrahman, 2011). Keempat, historiografi dilakukan untuk melaporkan hasil penelitian yang dituliskan secara sistematis dan kronologis.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah sosial. Guna menganalisis kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dan keagamaan. Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan konsep inklusi sosial yang di dasarkan pada konsep ukhuwah Islamiyah, tasamuh, dan ishlah. Menurut Simarmata, inklusi sosial adalah proses untuk memberikan daya pada individu atau kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat (Putra dkk., 2020). Tidak hanya itu, bahwa inklusi sosial bertujuan untuk membangun kehidupan masyarakat secara bersama dalam meraih tujuan kemakmuran bersama. Oleh karena itu, Nabi SAW, Khulafa Al-Rasyidun, dan sebagian khalifah Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah memberdayakan mawali agar tidak termarjinalkan secara sosial, politik, maupun ekonomi. Kaum mawali sebenarnya mempunyai kemampuan dalam berbagai aspek yang tidak dipunyai Muslim Arab.

Konsep ukhuwah Islamiyah menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas antar sesama umat Muslim. Ukhuwah Islamiyah juga berarti bahwa setiap Muslim harus memperlakukan sesama Muslim dengan baik dengan menghormati hak orang lain tanpa memandang suku, ras, atau agama (Faoziyah, 2023). Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Konsep tasamuh adalah sikap menyadari akan adanya perbedaan dan menghormati, baik itu dari keagamaan, suku, ras, golongan dan berbagai aspek kehidupan lainnya (Abdul Azis & A. Khoirul Anam, 2021). Oleh sebab itu, toleransi mengacu pada sikap terbuka dalam menerima perbedaan. Konsep ini berdasar pada Q.S. Al-An'am ayat 108, "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka". Dan Q.S. Al-Maidah ayat 48, "Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat

kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

Terakhir, konsep islah adalah proses penyelesaian persoalan antar pihak yang bersengketa guna menyelesaikan persoalan secara damai dalam berbagai aspek kehidupan (Abdul Azis & A. Khoirul Anam, 2021). Konsep ini bertujuan membawa manusia dalam proses perubahan dari kegelapan menuju jalan yang terang. Untuk mencapai tujuan itu, masyarakat juga harus terlibat dalam perbuatan reformatif dan konstruktif untuk memperoleh kemaslahatan bersama. Konsep ini berdasar pada Q.S. Al-A'raf ayat 142, “Dan Kami telah menjanjikan kepada Musa (memberikan Taurat) tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya (yaitu) Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah (dirimu dan kaummu), dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosial Masyarakat Arab

Masyarakat Arab dalam kelas sosial telah ada dalam sejak manusia mulai hidup bersama dalam organisasi sosial. Contohnya, dalam masyarakat dengan budaya sederhana, stratifikasi sosial atau kelas didasarkan pada perbedaan gender, kepemimpinan dan pengikut, pembagian kerja, dan juga perbedaan berdasarkan kekayaan. Dalam masyarakat seperti itu, perbedaan status dan peran biasanya minimal karena populasi kecil, dan status tinggi tidak melimpah, baik dalam jenis maupun jumlah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas masyarakat, sistem stratifikasi sosial juga menjadi lebih rumit. Sosiolog terkemuka, Pitirin A. Sorokin, menyatakan bahwa sistem kelas sosial adalah ciri tetap dan umum dalam masyarakat teratur. Mereka yang memiliki kekayaan dianggap memiliki status tinggi di mata masyarakat, sementara mereka yang memiliki sedikit atau tidak memiliki kekayaan dianggap memiliki status yang lebih rendah (Nasdian, 2015, hlm. 175).

Perkembangan masyarakat Arab, baik sebelum maupun setelah munculnya Islam, juga menunjukkan adanya kelas-kelas sosial di dalamnya. Kemajuan peradaban memengaruhi munculnya kelas-kelas baru dalam masyarakat. Kelas sosial sudah ada dalam masyarakat Arab yang menggunakan suku sebagai unit sosial pada masa pra-Islam. Setiap suku terdiri dari beberapa sub-suku, atau lebih dikenal dengan istilah Arab, "Qaum". Kadang-kadang, suku-suku akan membentuk perjanjian persahabatan untuk hidup damai yang dikenal sebagai "Al-ahlaf". Hidup bersama dengan suku dan patuh terhadap aturan suku atau kepala suku (sheikh) adalah kewajiban. Tidak hanya itu, meskipun mereka sangat menghormati keluarga, namun jika berkaitan dengan kehormatan suku, hal itu melebihi segalanya. Solidaritas suku ini, yang dikenal sebagai "ashabiyah," seperti yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun, dapat digunakan sebagai ukuran kekuatan suatu kelompok sosial, karena dapat menentukan kemenangan dan kelangsungan hidup suatu kelompok. Tanpa semangat ashabiyah ini, keberadaan suatu kelompok menjadi sulit dipertahankan (Ilham, 2016). Kehidupan di padang pasir yang keras membuat berbagai suku di Arab gemar berperang. Peperangan pada awalnya timbul dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Hukum di padang pasir adalah "yang kuat adalah yang berhak memiliki tempat," artinya yang kuat akan memiliki hak untuk memiliki tempat, sedangkan yang lemah akan kalah atau menjadi budak. Praktik-praktik seperti ini menyebabkan munculnya budak atau individu yang lemah yang berada di bawah perlindungan orang kaya atau individu yang lebih kuat, sehingga menghasilkan ketimpangan sosial dalam masyarakat (Wilaela, 2016, hlm. 61).

Secara garis besar, kelas sosial dalam masyarakat Arab pra-Islam terdiri dari dua kelas. Pertama, kelas fakir-miskin yang merupakan kelompok mayoritas. Mereka tinggal di tenda-tenda dan melakukan pekerjaan kasar. Kelas fakir-miskin termasuk orang Arab berkulit hitam dan kalangan awam. Kedua, kelas orang kaya yang terdiri dari para pedagang, pemberi pinjaman

uang dengan riba, dan pemilik budak. Selain dua kelas masyarakat tersebut, ada kelompok lain yang disebut "mawali" (non-Arab). Mereka adalah orang-orang yang mengikat diri pada suatu suku atau bergabung dengan orang-orang yang bukan dari golongannya sendiri. Mawali adalah kelompok menengah yang tidak memiliki status sebanyak suku asli. Mereka lebih dihormati daripada budak atau pekerja budak. Kelompok "pengusiran" (Alkhula'a) adalah kebalikan dari orang mawali. Mereka adalah orang-orang yang diusir oleh penduduk suku mereka dan tidak diikutsertakan dalam aktivitas mereka. Kelompok khula'a muncul sebagai kelas bawah setelah kelompok Mawali. Posisi mereka sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan budak yang terdiri dari tawanan perang atau orang-orang yang sengaja dibeli dari pasar budak (Karim K. A., 2002, hlm. 234).

Kedudukan Kaum Mawali dalam Islam

Kaum mawali pada awalnya adalah mereka suku-suku non-Arab yang berada di padang pasir atau orang asing non-Arab yang bergabung dengan suku-suku di Arab (Levy, 1986). Selanjutnya pada masa penaklukan wilayah yang dilakukan oleh Islam, pengertian kaum mawali mengalami perluasan. Kaum mawali setelah adanya penaklukan wilayah adalah mereka para tawanan perang atau budak yang telah di merdekakan oleh majikannya dan menjadi tentara perangnya yang kemudian sebagai imbalannya, kaum mawali mendapatkan perlindungan majikannya.

Suatu perlakuan lebih buruk ketika kaum mawali berada di kamp-kamp militer bangsa Arab. Para penguasa militer tidak memberinya keleluasaan dalam hal kecil dan tidak ada seorang Arab yang mau berjalan berdampingan dengan mereka saat berada di hari-hari penaklukan (Levy, 1986). Keberadaan mereka dalam acara-acara besar juga dipisahkan dari barisan orang-orang Arab. Saat itu kaum mawali sungguh berada di kedudukan rendah, mereka seperti di samakan dengan kedudukan seorang budak.

Pada masa Dinasti Umayyah, kedudukan mawali tidak mengalami perubahan. Mereka masih dalam kedudukan rendah. Kekuasaan Muawiyah semakin membuat jurang pemisah antara Arab dan mawali semakin terlihat (Karim, 2014). Dalam unsur keanggotaan masyarakat, Dinasti Umayyah yang fanatik dengan bangsa Arab, membuat kaum mawali hanya menjadi pendukung bangsa Arab (Maryam, dkk., 2009). Meskipun mengusung semangat Arabisme, Dinasti Umayyah juga mendorong adanya akulturasi budaya antara bangsa Arab dengan non-Arab (Abdurahman, 2016). Karena hidupnya berbagai komunitas yang ada di Damaskus, akulturasi adalah satu ihwal yang tidak terhindarkan. Meskipun penduduk di sana mayoritas mengagungkan budaya Arab.

Pembayaran pajak antara bangsa Arab dan mawali juga mengalami perbedaan. Masyarakat Arab diberikan kelonggaran dengan hanya membayar pajak kekayaan dan pajak kepemilikan tanah, sedangkan mawali harus membayar pajak kepala, pajak kekayaan, dan pajak kepemilikan tanah (Maryam, dkk., 2009). Akibatnya banyak mawali yang berasal dari desa-desa di Irak dan Khurasan berpindah ke kota-kota untuk bergabung menjadi prajurit militer (Hitti, 2006). Maka dengan ini, kaum mawali bisa terhindar dari pajak yang memberatkan dan mereka pun mendapatkan gaji ketika menjadi prajurit. Selain itu, perbedaan ini menyebabkan perasaan kebencian kaum mawali yang mengakibatkan adanya wacana pemberontakan untuk meruntuhkan Dinasti Umayyah.

Dalam hal gaji sebagai prajurit, kaum mawali juga dibedakan dengan bangsa Arab. Kaum mawali biasanya menerima gaji setelah beberapa lama mereka berhasil melakukan penaklukan, nominalnya pun lebih kecil. Bahkan di beberapa kejadian, ketika kaum mawali ikut serta perang hak mereka dirampas untuk mendapatkan ghanimah (Levy, 1986). Sikap diskriminasi sering dilakukan bangsa Arab, akibat keunggulan status sosial mereka atas bangsa lainnya. Terlebih bangsa Arab terhegemoni atas berkuasanya Dinasti Umayyah yang nota bene sangat mengunggulkan bangsa Arab.

Meskipun menurut Dudung Abdurrahman dari segi budaya, masyarakat Damaskus menjunjung multikulturalisme dan konflik antar agama di Damaskus relatif tidak ditemukan, hanya dua suku yaitu suku Himyariyah dan Mudariyah yang sering berkonflik

(Abdurahman, 2016). Tetapi hal ini tidak menutup adanya sikap diskriminatif dari segi politik, kemiliteran dan status sosial oleh beberapa bangsa Arab, khususnya penguasa Dinasti Umayyah.

Pada masa kekuasaan Umar II, kaum mawali mulai mendapatkan kelonggaran. Umar II tidak membebankan pajak apapun untuk kaum mawali dan menegaskan bahwa tanah kharaj adalah tanah milik bersama komunitas Islam (Hitti, 2006). Namun, kebijakan baik ini mengakibatkan penurunan drastis pemasukan negara atas pajak. Jumlah mawali juga mengalami peningkatan, karena orang-orang Persia dan Barbar yang berbondong-bondong masuk Islam ingin menikmati keistimewaan finansial itu (Hitti, 2006).

Kedudukan kaum mawali mulai mengalami perbaikan setelah pergantian kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah. Atas bantuan orang-orang mawali keturunan Persia dan Khurasan dalam menaklukkan Umayyah, Abbasiyah menjalankan pemerintahannya dengan lebih asimilatif. Kedudukan antara orang Arab dan kaum mawali lebih setara dibanding dengan sebelumnya. Politik balas budi sungguh terlihat dalam pemerintahan Abbasiyah (Elda Haris Fauzan, 2022).

Pada masa Abbasiyah kaum mawali mendapatkan fasilitas dan menduduki jabatan strategis (Karim, 2014). Beberapa orang dari kaum mawali unggul seperti orang Persia dan Turki, telah mendapatkan tempat mulia di sisi khalifah. Sejak saat itu cendekiawan mawali mulai aktif menyuarakan apologi ukhuwah Islamiyah yang harus diterapkan semua Muslim tanpa memandang status sosial (Levy, 1986). Keaktifan ini mendapatkan hasil pada masa Al Ma'mun, karena banyaknya orang-orang Persia yang masuk ke ibukota untuk menegakkan posisi kaum mawali agar setara dengan saudaranya bangsa Arab (Levy, 1986).

Pada masa kekuasaan Harun al-Rasyid dan Al Mansur keluarga Barmak dari Persia dijadikan sebagai penasehat dan menteri yang mendominasi kekuasaan politik di Abbasiyah (Karim, 2014). Anak dari Khalid yang bernama Yahya juga menjadi guru dari Harun sejak dari kecil. Kedekatan keluarga Barmak dengan keluarga kerajaan, terlihat seperti sudah menjadi saudara dekat. Namun, di masa berikutnya kaum mawali masih berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya kaum mawali Negro (berkulit hitam). Doktrin keunggulan bangsa Arab dari bangsa lainnya akhirnya tetap bertahan sampai perjalanan sejarah selanjutnya. Terlebih bangsa Arab keturunan Nabi SAW yang sangat dihormati dan mendapatkan posisi utama dalam status sosial masyarakat Islam.

Peran Kaum Mawali dalam Islam

Perluasan wilayah Islam membawa banyak golongan non-Muslim dan non-Arab masuk Islam untuk menghindari beban pajak yang besar. Maka tidak heran jika perluasan Islam juga berpotensi menambah jumlah masyarakat Islam di dunia. Selain itu, para mawali juga mempunyai peran dalam perkembangan peradaban Islam di dunia. Kaum mawali dari Persia termasuk dalam orang terdidik yang lama bergelut dalam bidang ilmu pengetahuan. Mawali Persia banyak menciptakan ilmuwan-ilmuwan yang ahli dalam bidang Ushuluddin, Fiqih, filsafat, Bahasa dan Sastra Arab. Doktor dan Profesor paling awal dan paling terkenal saat ini adalah orang-orang Persia (Levy, 1986). Para panglima perang Islam saat itu memanfaatkan kekuatan masyarakat daerah taklukan seperti Afrika Utara untuk dijadikan anggota militer. Kebanyakan dari mereka yang dijadikan anggota militer dari orang barbar (Maryam, dkk., 2009). Orang-orang barbar dikenal sebagai kaum yang kuat dan tangguh dalam berperang.

Hubungan erat Muslim dengan Yahudi dan Kristen dalam jaringan perdagangan menimbulkan juga menimbulkan ketergantungan. Saat penguasa perdagangan non-Muslim mulai masuk Islam, mereka akhirnya berperan penting dalam perkembangan ekonomi Muslim di Arab dan ketergantungan mulai menurun (Hourani, 2004). Kekuasaan kafilah dagang, secara bertahap membuat perekonomian Islam di beberapa daerah mulai mengalami peningkatan. Ini adalah tren positif dalam sejarah Islam, di mana orang-orang yang menempati posisi penting dalam perekonomian menjadi muallaf. Meskipun mereka bukan asli orang Arab.

Dalam perkembangan bidang bahasa dan sastra, kaum mawali ikut berperan dengan menelurkan beberapa sastrawan terkenal dari Andalusia kelahiran Cordova. Mereka adalah Abu

Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Rabbiah dan Abu Amir Abdullah ibn Syuhaid. Salah seorang mawali dari Irak yang bernama Hasan ibn Nafi' (Ziryab) dan berhasil menciptakan notasi bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do (da, ra, mim, fa, shad, lam, sin). Kemudian penulis biografi yang terkenal kelahiran Cordova yaitu Abu al-Walid Abdullah ibn Muhammad ibn al-Faridl dengan karya *Tarikh Ulama'i al-Andalus* (Maryam, dkk., 2009).

Keluarga Barmak yang berasal dari Persia berperan penting dalam kemajuan Abbasiyah. Barmak adalah keluarga yang awalnya beragama Budha yang kemudian masuk Islam dan menjadi kepercayaan keluarga khalifah (Abdurahman, 2016). Keluarga ini berhasil melakukan peningkatan kesejahteraan, kebahagiaan rakyat, dan memperkuat Dinasti Abbasiyah (Karim, 2014). Khalid sebagai pendiri keluarga Barmak, menjabat kedudukan penting sebagai menteri dan penasihat Al Mansur. Secara turun-temurun keluarga Barmak bekerja dan mengabdikan kepada Dinasti Abbasiyah (Hasanah, 2022). Namun setelah perang pada tahun 795 M, pengaruh keluarga ini mulai berkurang.

Pada masa Abbasiyah kegiatan ilmiah menjadi paling maju. Gerakan penerjemahan mulai dilakukan. Al Mansur memanfaatkan tenaga orang-orang Persia yang baru masuk Islam. Nawabakt, Ibrahim al-Farizi, dan Ali ibn Isa adalah orang Persia yang diperintah untuk menerjemahkan ilmu astrologi yang berbahasa Persia (Maryam, dkk., 2009). Selain menggunakan ilmuwan mawali, khalifah Abbasiyah juga menggunakan ilmuwan Kristen dari Yunani untuk melakukan gerakan penerjemahan.

Pada bidang kemiliteran Al Ma'mun menyerahkannya kepada Tahir (bangsawan dari Khurasan) yang juga sebagai gubernur Khurasan. Ia membawahi seluruh pasukan militer dari Dinasti Abbasiyah. Tahir dipilih karena ia dikenal ahli dalam strategi perang dan pemberani. Pasukan-pasukan Khurasan juga dikenal sebagai pasukan yang kuat dan pemberani (Maryam, dkk., 2009). Meskipun Bani Abbasiyah memerintah dengan menyandarkan pada hukum Islam, namun tetap memberikan kebebasan kepada masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai lokal (Abdurahman, 2016).

Setelah masa Abbasiyah, beberapa mawali mulai menunjukkan eksistensinya dengan mendirikan kerajaan-kerajaan Islam diberbagai penjuru dunia. Bani Saljuk didirikan oleh kaum Turki yang tinggal di Asia Tengah. Dinasti Safawi di Persia, dinasti Ghazni, Ghuri, Tughlaq, dan Dinasti Mughol di India. Praktis masa Dinasti Abbasiyah sebagai awal berdirinya eksistensi kaum mawali dalam peradaban Islam. Mereka juga membawa perubahan signifikan dalam mempersatukan kehidupan sosial, agama dan negara. Kaum mawali menjadikan Islam mampu bertransformasi menjadi masyarakat yang inklusif yang mampu berdikari membangun kemakmuran bersama dalam berbagai aspek kehidupan.

KESIMPULAN

Kaum mawali dalam sejarah Islam mengalami perluasan pengertian. Mereka awalnya adalah orang Arab penduduk gurun pasir yang masuk Islam. Setelah Islam menyebar dan menguasai wilayah lain, mawali mencakup juga orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Namun kedudukan kaum mawali masih dianggap rendah sebagai seorang budak karena tidak mempunyai nasab dari orang Arab ataupun dari Nabi SAW. Meskipun kaum mawali khususnya Persia mampu menunjukkan geliatnya dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi mereka masih dianggap kalangan bawah. Kerugian dari sistem mawali membuat Muslim non-Arab menempuh berbagai cara untuk memperbaiki nasib mereka.

Kaum mawali menjadi kalangan pertama yang mencurahkan hidupnya untuk mempelajari filsafat, seni, dan agama. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi tradisi keilmuan yang lebih tua dari bangsa Arab. Kedudukan mereka sebagai mawali tidak memungkinkan untuk terjun dalam bidang lain seperti politik. Karena kekuasaan politik dikuasai penuh oleh bangsa Arab. Oleh karena itu, kontribusi kaum mawali banyak tercurahkan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Namun setelah penguasaan dalam bidang intelektual, kaum mawali kemudian mulai bersaing dengan bangsa Arab dalam bidang politik. Hingga akhirnya, kehadiran mereka mampu membawa kesadaran umat Islam akan pentingnya

persatuan dalam membangun inklusi sosial, multikulturalisme, dan akulturasi dalam semangat nilai-nilai ukhuwah islamiyah, tasamuh, dan ishlah.

REFERENSI

- Abdurahman, Dudung. (2016). Fenomena Mutlikulturalisme Dalam Sejarah Islam Klasik. *Thaqafiyat*, 17 (1), 36-53. <https://doi.org/10.14421/thaq.2016.%25x>
- Abdurrahman, Dudung. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Abidin, Zain. (2013). Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin Dan Sejarah. *Humaniora* 4 (2), 1273-1291. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3571>
- Elda Haris Fauzan, A. M. setiawan. (2022). The Birth of the Three Great Islamic Kingdoms in the Middle Ages (1250-1800 AD). *El Tarikh*, 3(sejarah islam klasik), 44-56. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/jhcc.viii.10682>
- Faoziyah, Sitti. (2023). Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5 (1), 47-56. <https://doi.org/10.54783/jin.v5i1>
- Hamid, A. R., & Madjid, M. S. (2015). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit Ombak.
- Hasanah, U. (2022). Islamic Intellectual Development during the Abbasid Dynasty (750 AD-861 AD). *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 1-11.
- Hitti, P. K. (2006). *History of Arabs*. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Hourani, Albert. (2004). *Sejarah Bangsa-bangsa Arab*. Mizan.
- Ikhsan, M. (2015). Jejak Kegemilangan Intelektualisme Islam dalam Pentas Sejarah Dunia: Kontribusi Ilmiah Kaum Mawali Persia pada Periode Klasik. *Shautut Tarbiyah*, 33 (21), 77-90. <http://dx.doi.org/10.31332/str.v21i2.371>
- Azis, Abdul & Khoirul, A. Anam. (2021). *Moderasi Beragama Belandaskan Nilai-nilai Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. www.pendis.kemendagri.go.id/pai/
- Karim, M. A. (2014). *Sejarah Pemikiran dan peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah Sosial Ummat Islam Bagian Kesatu & Dua*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Levy, R. (1986). *Susunan Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Maryam, S. dkk. (2009). *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI.
- Putra, P., Gutama, B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10 (1), 70-80. <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834>
- Saragih, S. (2000). *Peranan Mawali Dalam Pemerintahan Islam Dinasti Umayyah (Studi Tentang Sejarah Hukum Islam)*. Medan: Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara.
- Yusrul, M. Hana. (2020). Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Perubahan Sosial Masyarakat di Jazirah Arab: Transformasi Kultural Ashabiyah dalam Menunjang Kekuasaan Nabi Muhammad. 15(2), 115-128. <http://dx.doi.org/>